

**PENERAPAN SANKSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
HIDUP BERSAMA BUKAN SUAMI ISTERI SAH DI
KABUPATEN ENDE DITINJAU DARI PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG IJIN
PERKAWINAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

SKRIPSI



OLEH:

DOMINIKA THERESIA ITO

NIM: 2018110258

**FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS FLORES
ENDE
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

PENERAPAN SANKSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG HIDUP BERSAMA BUKAN SUAMI ISTERI SAH DI
KABUPATEN ENDE DITINJAU DARI PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG IJIN
PERKAWINAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

SKRIPSI

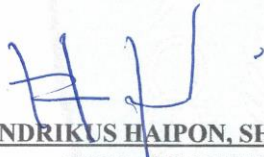
DI SUSUN OLEH :

DOMINIKA THERESIA ITO
NIM : 2018110258

DISETUJUI

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II



HENDRIKUS HAIPON, SH., M.HUM
NIDN : 0812117801



ERNESTA ARITA ARL, S.H., H.HUM
NIDN : 0820046904

MENGETAHUI

DEKAN FAKULTAS HUKUM
DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES



CHRISTINA BAGENDA, S.H., M.H
NIDN. 0823036701

KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM
UNIVERSITAS FLORES



HENDRIKUS HAIPON, SH., M.HUM
NIDN : 0812117801

LEMBAR PENGESAHAN






PENERAPAN SANKSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG HIDUP BERSAMA BUKAN SUAMI ISTRI SAH DI KABUPATEN ENDE DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

**SKRIPSI
DISUSUN OLEH:**

DOMINIKA THERESIA ITO
NIM: 2018 110 258

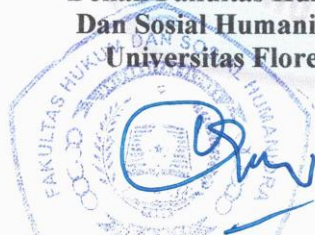
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi
Pada Tanggal 09 Agustus 2024

**Disahkan
Dewan Penguji Skripsi:**

- | | | |
|-------------------------------------|--------------|--|
| 1. Yohanes Don Bosco Watu, S.H.,M.H | (Ketua) | 1.  |
| 2. Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum | (Sekretaris) | 2.  |
| 3. Bernadus Basa Kelen, S.H.,M.Hum | (Anggota) | 3.  |
| 4. Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum | (Anggota) | 4.  |
| 5. Ernesta Arita Ari, S.H.,M.Hum | (Anggota) | 5.  |

Mengetahui

**Dekan Fakultas Hukum
Dan Sosial Humaniora
Universitas Flores**



Christina Bagenda, S.H.,M.H
NIDN: 0823036701

**Ketua Program Studi
Ilmu Hukum
Universitas Flores**



Hendrikus Naipon, S.H.,M.Hum
NIDN: 0812117801

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dominika Theresia Ito

NIM : 2018110258

Program Study : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Sosial Humaniora

Menyatakan bahwa sripsi dengan judul : **PENERAPAN SANKSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG HIDUP BERSAMA BUKAN SUAMI ISTRI SAH DI KABUPATEN ENDE DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian /karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain,maka saya siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembahga.

Ende, Agustus 2024

Penulis



Dominika Theresia Ito

MOTTO

**“Tumbuh bersama-sama menjadi individu yang baik
adalah jalan menuju perkawinan yang bahagia.**

(Dominika Theresia Ito)

PERSEMBAHAN

Salam sejahtera bagi kita semua

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dan do'a dari berbagai pihak, tugas akhir ini tidak dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyelesaian tugas akhir ini, yaitu kepada:

1. Penulis ucapkan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang selalu memberikan rahmat dan karunianya bagi penulis sejak penulis memulai kehidupan hingga pada akhirnya bisa berada pada jenjang pendidikan ini terutama bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Bapak Peterus Botha dan Mama Bibiana To, yang dengan hati yang tulus ikhlas dan tanpa pamrih telah dengan susah paya, membesarkan dan membimbing peneliti
3. Bapak Paulus Wangga Ngere dan Mama Veronica Ri'a, selaku bapak dan mama mantu penulis yang selalu mensupport dan membei motivasi penulis
4. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Flores tercinta, terima kasih atas pengajarannya di kelas yang sangat berharga dan menjadi inspirasi bagi masa depan penulis, selain itu juga ucapan terimakasih khususnya kepada Bapak dan Ibu dosen pembimbing yang selalu bersedia memberikan waktu, tenaga, kritik serta saran kepada penulis demi penyempurnaan tugas akhir ini.

5. Kakak-kakak tersayangku, Blasius Oskardus Deghe dan Maria Agustina Sina Bota trimakasih untuk dukungan yang tidak pernah putus.
6. Kakak dan adik ipar penulis ,Brian More, Wendi More, priska Flores, Fery Meko, Terimakasih atas suportnya
7. Bapak ci Ose, Mama ci Melda, ade Nona, Kesya dan Nadia, Penuli mengucapkan terimakasih sudah bersedia membantu menjaga Junores anak penulis selama mengerjakan tugas akhir sampai selesai
8. Untuk Kristian Ewaldino Turu More suami sekaligus bapak dari anak penulis yang selalu menemani penulis dari awal hingga akhir dan selalu memberi semangat.
9. Terimakasih untuk sahabat grup Pejuang Skripsi, Ines Wende, Rian Hidayat, Virda Pilli, Aty Sady, dan Irham Safrudin yang selalu mensupport penulis.
10. Trimakasih untuk sahabat Nando Bele dan Nani Rawi yang selalu mensupport dan membantu penulis dalam segala hal.
11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018 program studi Ilmu Hukum yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu
12. Penulis ucapkan terimakasih untuk Almamater tercinta Universitas Flores dan program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan kekuatan serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul, **”PENERAPAN SANKSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG HIDUP BERSAMA BUKAN SUAMI ISTRI SAH DI KABUPATEN ENDE DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG IJIN PERKAWINAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL”**, dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Ilmu Hukum, Universitas Flores.

Penulisan skripsi ini merupakan karya ilmiah yang dimana selama proses penyusunan tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin memberikan terimakasih yang berlimpah kepada:

1. Bapak Dr. Laurentius D. Gadi Djou, Akt selaku ketua yayasan perguruan tinggi Universitas Flores
2. Rektor Universitas Flores Bapak Dr. Wilybrodus Lanamana, M.M.A, beserta jajarannya yang dengan bijaksana memimpin Lembaga Pendidikan Tinggi Universitas Flores.
3. Dekan Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora Ibu Cristina Bagenda, S.H.,M.H, dan yang dengan bijaksana menyelenggarakan proses pembelajaran di tingkat fakultas.
4. Wakil Dekan 1 Bapak Agustinus F. Paskalino Dadi S.FIL,M.Hum Bidang Akademik

5. Wakil Dekan 2 Ibu Ernesta Arita Ari S.H.,M.Hum Bidang Administrasi Umum,Keuangan dan Kepegawaian dan sebagai dosen pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan masukan dengan sabar dan ikhlas dan selalu memberikan motivasi yang membangun.
6. Wakil Dekan 3 Ibu Gratiana Sama, SH., M.Hum, Bidang Kemahasiswaan
7. Ketua program studi ilmu hukum Bapak Hendrikus Haipon, SH., M, Hum, dan sebagai Dosen pembimbing I yang sudah membim dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
8. Bapak Ibu dosen Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora yang telah memberikan ilmu akademik dalam bidang hukum selama mengikuti proses perkuliahan.
9. Bapak dan Ibu Pegawai Program Studi Ilmu Hukum yang dengan penuh pengabdian melayani dan melancarkan semua urusan administrasi.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu baik moril maupun meril kepada penulis. Semoga amal kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dibalas dengan selayak-layaknya oleh Tuhan Yang Maha Baik. Disertai dao dan harapan, penulis mempersembahkan karya Ilmiah dalam bentuk skripsi ini.

Ende, Agustus 2024

Hormat Penulis

Dominika Theresia Ito

ABSTRAK

Judul skripsi ini adalah “Penerapan Sanksi Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Hidup Bersama Bukan Suami Istri Sah di Kabupaten Ende DiTinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Bagi Pegawai Negeri Sipil” Disusun Oleh Dominika Theresia Ito, NIM: 2018110258

Dalam masalah perkawinan dan perceraian harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil hampir setiap definisi mengenai hukum, hal yang menjadi titik perhatian yang dikedepankan oleh para pakar dan praktisi hukum adalah bahwa hukum itu mempunyai sanksi,tanpa sanksi maka suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan sebagai tidak mempunyai nilai hukum.

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah Bagaimana Penerapan Sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang hidup bersama bukan suami istri sah di Kabupaten Ende diTinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil. Apa faktor penyebab Pegawai Negeri Sipil yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah pendekatan penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder. Suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penuls maka penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa dalam menegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam menjatuhkan sanksi hukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum seperti perbuatan hidup bersama bukan suami istri sah belum benar-benar mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.Ada beberapa faktor yang menyebabkan Pegawai Negeri Sipil hidup bersama tanpa ikatan yang sah,yaitu ketidak puasan dalam hubungan,kurangnya komunikasi dan dukungan dari pasangan sah,kesempatan dan lingkungan kerja,faktor sosial dan budaya,serta tekanan ekonomi.

Meskipun terbukti terjadi pelanggaran yang dilakukan Pegawai negeri sipil di Kabupaten Ende, dalam penanganan yang dilakukan instansi justru dilakukan langkah kompromi, Artinya penanganan yang dilakukan tidak sesuai dengan yang disebutkan dalam pasal 16 PP No,10 tahun 1983 yang menyebutkan tindak pemecatan jika ada seorang PNS yang terbukti melanggar peraturan. Dalam pelaksanaannya jika seorang PNS terbukti melakukan pelanggaran, sanksi yang biasa dilakukan adalah penurunan pangkat, tidak diberikan jabatan, atau menghambat kenaikan gaji berkala.

Kata Kunci : Penerapan Sanksi, Pegawai Negeri Sipil, Perkawinan

ABSTRACT

The title of this thesis is "Implementation of Sanctions for Civil Servants Who Live Together with Non-Legal Husband and Wife in Ende Regency Reviewed from Government Regulation Number 45 of 1990 Concerning Marriage Permits for Civil Servants" Compiled by Dominika Theresia Ito, NIM: 2018110258

In matters of marriage and divorce must refer to Government Regulation Number 45 of 1990 Concerning Marriage and Divorce Permits for Civil Servants almost every definition of law, the point of attention put forward by legal experts and practitioners is that the law has sanctions, without sanctions then a statutory regulation can be said to have no legal value.

The formulation of the problem in this study is How to Implement Sanctions for Civil Servants who live together with non-legal husbands in Ende Regency Reviewed from Government Regulation Number 45 of 1990 concerning Marriage Permits for Civil Servants. What are the factors causing Civil Servants to live together without a legal marriage bond?

The approach method used in this study is a normative research approach, which is a legal research conducted by examining library materials or secondary data. A process to find a legal rule, legal principles, or legal doctrines in order to answer the legal issues faced.

Based on the results and discussions that have been carried out by the author, the researcher draws a conclusion that in enforcing the discipline of Civil Servants in imposing legal sanctions on Civil Servants who have been proven to have committed unlawful acts such as living together without a legal husband and wife, it has not really referred to Government Regulation Number 45 of 1990. There are several factors that cause Civil Servants to live together without a legal bond, namely dissatisfaction in relationships, lack of communication and support from legal partners, opportunities and work environments, social and cultural factors, and economic pressures.

Although it was proven that violations were committed by civil servants in Ende Regency, in the handling carried out by the agency, a compromise was taken, meaning that the handling carried out was not in accordance with that stated in Article 16 of PP No. 10 of 1983 which states that dismissal is carried out if a civil servant is proven to have violated the regulations. In its implementation, if a civil servant is proven to have committed a violation, the usual sanctions are demotion, not being given a position, or inhibiting periodic salary increases.

Keywords: Application of Sanctions, Civil Servants, Marriage

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Ruang Lingkup Masalah	7
1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan	7
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.8 Lokasi Penelitian	11
1.9 Sistem Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Sanksi / Penerapan Sanksi.....	13
BAB III PENERAPAN SANKSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG HIDUP BERSAMA BUKAN SUAMI ISTERI SAH DI KABUPATEN ENDE DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.....	31

3.1 Hukuman Disiplin Ringan	32
3.2. Hukuman Disiplin Sedang	35
3.3. Hukuman Disiplin Berat	40
3.4.Sanksi Hukum tentang Izin Perkawinan ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990	47
3.5 Ketentuan yang mengatur tentang Sanksi Hukum ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.....	56
BAB IV FAKTOR PENYEBAB PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG HIDUP BERSAMA TANPA IKATAN PERKAWINAN YANG SAH.....	62
4.1 Ketidakpuasan dalam Hubungan Bersama Pasangan Sah.....	62
4.2 Kurangnya komunikasi dan dukungan dari pasangan sah.....	63
4.3 Kesempatan dan Lingkungan Kerja	64
4.4 Faktor Sosial dan Budaya:.....	64
4.5 Tekanan Ekonomi:.....	65
BAB V PENUTUP.....	67
5.1 Kesimpulan.....	67
5.2 Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN